

**PRINSIP-PRINSIP OPOSISI DALAM AL-QU'RAN**  
**“Studi Analisis Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-**  
**Azhar”**

Abd. Mun'em  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: abdmunem03@gmail.com

**ABSTRACT**

This writing will explain the discourse of opposition in Islamic politics in Indonesia by making Hamka and Al-Azhar's interpretation as the object of study. The term opposition is significant because it is often misunderstood and used, both by the Western world and internally the Muslims itself. The West labels Islamic politics as anti-criticism and contrary to the spirit of democracy because it sees several Islamic countries that show more authoritarianism and dictatorship. They see that there is no justice in Islamic politics, because the opposition is second class and vulnerable to being silenced. Paradoxical phenomena are found among internal Muslims, especially in Indonesia, where it gets freedom and even guarantees in expressing their aspirations, either by sending letters, having dialogues, or even holding demonstrations on the streets. Checks and balances are the basis for the opposition movement, however, freedom of expression that exceeds the limits of reasonableness to cause anarchic and

provocative actions cannot be justified because it violates the law and deviates from ethics and morality. Therefore, this study will trace Hamka's idea of ideal opposition in his interpretation by using library research and Fazlur Rahman's double movement hermeneutic theory. With this is theory, it is found that actually the Qur'an has discussed the principles of opposition to uphold justice and eliminate the tyranny of office holders.

**Keywords:** Principles, Opposition, Hamka

### ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas wacana oposisi dalam politik Islam di Indonesia dengan menjadikan Hamka dan tafsir Al-Azhar sebagai objek kajian. Term oposisi menjadi signifikan karena seringkali disalah arti dan digunakan, baik oleh dunia Barat maupun internal Muslim sendiri. Barat melabeli politik Islam sebagai anti kritik dan bertentangan dengan spirit demokrasi karena melihat beberapa negara Islam yang lebih menampakkan sifat otoritarianisme dan kediktatoran. Mereka menilai tidak ada keadilan dalam politik Islam, karena pihak oposisi menjadi *second class* dan rentan dibungkam. Fenomena paradoks didapati pada internal Muslim khususnya di Indonesia, di mana pihak oposisi mendapatkan kebebasan bahkan garansi dalam menyampaikan aspirasinya, baik dengan mengirim surat, berdialog, bahkan dengan melakukan demonstrasi di jalanan. *Checks and balances* menjadi dasar bagi gerakan oposan, hanya saja kebebasan dalam berekspresi yang melebihi batas kewajaran hingga menimbulkan tindakan

anarkis dan provokatif juga tidak bisa dibenarkan karena melanggar hukum dan melenceng dari etika dan moralitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan melacak gagasan Hamka tentang oposisi yang ideal dalam tafsirnya dengan menggunakan analisa pustaka (*library research*) dan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Dengan teori ini didapati bahwa sebenarnya Al-Qur'an telah membincang prinsip-prinsip oposisi untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman para pemangku jabatan.

**Kata Kunci:** Prinsip-Prinsip, Oposisi, Hamka

## PENDAHULUAN

Wacana oposisi dalam politik Islam menjadi hal menarik untuk dibahas, karena Barat telah memberikan stereotipe bahwa politik Islam bertentangan dengan demokrasi dan cenderung anti kritik. Barat memandang otoritarianisme yang berlaku di beberapa negara Islam sebagai wajah asli dari politik Islam.<sup>1</sup> Padahal jauh sebelum Revolusi Prancis, Islam telah memperkenalkan konsep *Shura* untuk menjembatani kebebasan, keadilan dan persaudaraan antar pemeluk agama dan warga negara.<sup>2</sup> Term oposisi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pihak atau partai penentang di dalam dewan perwakilan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, silang pendapat yang

---

<sup>1</sup> Baca "Pengantar Redaksi" dalam Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam*, terj. Ali Ghufron, (Yogyakarta: LKiS, 2012), v.

<sup>2</sup> *Ibid.*, vi.

<sup>3</sup> *KBBI*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1091.

tajam antara pihak pemerintah dan oposan menjadi hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

Salah satu tugas pokok oposisi adalah menyampaikan kritik dan saran yang telah digaransi oleh negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>4</sup> Maka untuk mengawal pemerintah, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu orang dan harus dibagi ke dalam institusi negara dengan kewenangan yang berbeda, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan (*check and balance*).<sup>5</sup> Apabila terdapat kebijakan yang menyalahi undang-undang dan merugikan rakyat seperti korupsi, ketidakadilan, kesewenang-wenangan atau keterlambatan dalam menangani suatu kasus, maka pihak di luar lingkaran pemerintah terutama oposisi berhak untuk bersuara dan menegur mereka.

Aspirasi kepada pemerintah dapat disampaikan dengan berbagai cara, misalnya dengan berdialog, mengirim surat, mengutus perwakilan atau dengan melakukan aksi turun ke jalan bersama dengan mengumpulkan massa. Aksi turun ke jalan bersama (demo) merupakan hal yang lumrah kita jumpai di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, karena demonstrasi dianggap sangat efektif dalam mengontrol kebijakan negara yang sering tidak memihak pada kepentingan rakyat.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syarif Hasyim, "Oposisi Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Rausyan Fikr* 12, no. 2 (2016): 290.

<sup>5</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 67.

Meski demonstrasi merupakan cara efektif dalam menyampaikan pendapat, akan tetapi demonstrasi yang dilakukan di Indonesia sering kali melebihi batas kewajaran karena diwarnai dengan tindakan yang anarkis seperti merusak dan mengotori sarana-prasana, mengganggu ketertiban umum dan sarat provokasi serta caci maki. Bentrok dengan aparat keamanan menjadi pilihan utama, karena aparat keamanan dinilai tidak pro-rakyat. Aksi-aksi demonstrasi yang tidak elegan semacam ini menunjukkan kurang dewasa dalam menyampaikan aspirasi, bahkan cenderung melanggar hukum dan melenceng dari etika dan moralitas. Demonstrasi yang awalnya dinilai sebagai tindakan pro-rakyat, serta-merta hilang akibat ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memicu hilangnya simpati dari masyarakat.<sup>6</sup>

Pada tanggal 8 Oktober 2020, terjadi demo besar-besaran menolak Omnibus Law yang dilakukan oleh mahasiswa di Malang, Jakarta, Yogyakarta dan beberapa kota lainnya. Demonstrasi di Yogyakarta berujung anarkis, sehingga keluarlah himbauan dari Sultan HB X agar tidak melakukan aksi demo lagi karena hanya mengganggu keamanan, ketertiban dan merusak fasilitas umum.<sup>7</sup> Jauh

---

<sup>6</sup> Dian Putri dan Eficandra, "Demonstrasi dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 92.

<sup>7</sup> Toni Kurniawan, "Larangan Demo oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta", *Jurnal Politica* 8, no. 1 (2021) 23.

sebelum itu, pada 24 April 1996, terjadi bentrokan antara mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan polisi dalam aksi penolakan terhadap kenaikan tarif angkutan umum yang dinilai memberatkan rakyat kecil. Demonstrasi yang sarat dengan provokasi dan caci maki tersebut akhirnya menimbulkan bentrokan dan jatuhnya korban yang menyebabkan tiga dari mahasiswa meninggal dan beberapa polisi luka-luka.<sup>8</sup>

Salah satu problem yang sering disuarakan dalam demonstrasi terhadap pemerintah adalah korupsi. Jika dikaji lebih dalam, maka jelas bahwa tatanan masyarakat dalam suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, bahkan sebaliknya, rakyatlah yang menjadi penggerak utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam beberapa penelitian, didapati bahwa salah satu faktor utama terjadinya tindakan korupsi adalah politik uang (*money politic*) dalam Pemilu. Rakyat kita sudah terbiasa dengan politik uang, sehingga pilihan suara mereka ditentukan oleh banyaknya uang.<sup>9</sup> Maka ketika tidak ada uang, mereka acuh-tak acuh untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi bahkan memilih golput.

Jika rakyat maupun pihak oposan selalu menuntut terwujudnya pemerintahan yang ideal, maka seharusnya

---

<sup>8</sup> Hasse J., "Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar," *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (2012): 52.

<sup>9</sup> Rian Sapiro, "Kajian Praktik *Money Politics* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Adil Indonesia* 1, no. 1 (2019): 53-54.

mereka juga harus mampu memosisikan mereka pada level yang ideal pula. Jika rakyat dan oposan bersikeras mengawasi kinerja pemerintah, maka seharusnya mereka juga menunaikan kewajiban mereka dengan baik. Karena jika ada prinsip-prinsip pemerintahan, maka seharusnya juga ada prinsip-prinsip kerakyatan dan oposan. Prinsip (*principle*) berarti dasar atau asal dari suatu pandangan dan keyakinan.<sup>10</sup> Dalam KBBI, ia diartikan sebagai asas atau dasar kebenaran yang menjadi landasan berpikir dan bertindak.<sup>11</sup> Jika dihubungkan dengan oposisi, maka prinsip oposisi berarti kebenaran yang dijadikan sebagai dasar berpikir dan bertindak oleh pihak yang menentang kebijakan pemerintah. Problem-problem inilah yang akan menjadi gerakan pertama dalam teori Fazlur Rahman sekaligus menjadi dasar interpretasi lanjutan tentang oposisi dalam Al-Qur'an.

Kajian seputar oposisi dalam dunia Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam bukunya yang dialih bahasakan dengan judul *Oposisi Islam*, Dr. Neveen Abdul Khalik Musthafa mengupas secara luas tentang oposisi, khususnya dalam kaca mata Islam. Mulai devinisi, dasar hukumnya dalam Islam, hingga sejarah munculnya aliran-aliran oposisi dalam Islam. Keterkaitan antara term oposisi dengan beberapa kalimat dalam Al-Qur'an seperti *at-Tanzu'*

---

<sup>10</sup> Asrowi, "Prinsip-Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah* 7, no. 1 (2019): 98.

<sup>11</sup> *KBBI*, 1214.

(perselisihan), *al-mujadalah* (perdebatan) dan *asy-syijar* (pertentangan) menjadi titik temu yang ditengarai sebagai asas lahirnya oposisi dalam Islam.<sup>12</sup>

Kajian lebih spesifik dilakukan oleh Muhammad Syarif Hasyim melalui artikelnya yang berjudul *Oposisi Perspektif Al-Qur'an*. Ia mencoba mengurai makna oposisi dan fungsinya. Selain itu, secara singkat ia juga menambahkan etika dalam beroposisi, yaitu tunduk kepada pemimpin dan bersikap lemah lembut dalam menyampaikan.<sup>13</sup> Dua tulisan ini sama-sama berbicara tentang ruang lingkup oposisi dalam al-Qur'an, hanya saja tidak menjabarkan secara komprehensif tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam beroposisi.

Maka untuk mendalami kajian ini, ada dua rumusan masalah yang akan diajukan: *Pertama*, apa sebenarnya hakikat oposisi dalam negara demokrasi? *Kedua*, apa saja prinsip-prinsip oposisi yang dikemukakan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar? Dari dua pertanyaan ini, kita akan mendapati gagasan-gagasan Hamka tentang prinsip-prinsip dalam beroposisi sehingga menjadi oposisi yang ideal, sebagaimana tercermin dalam keterlibatan Hamka dalam carut-marutnya pemerintahan pada masa Orde Lama hingga Orde Baru yang penuh dengan intervensi dari pemangku jabatan.

## **METODE DAN TEORI PENELITIAN**

---

<sup>12</sup> Neveen Abdul Malik Musthafa, *Oposisi Islam*, (Yogyakarta: LKis, 2012), 99-101.

<sup>13</sup> Muhammad Syarif Hasyim, "Oposisi Perspektif Al-Qur'an," 305-308.

Penelitian ini berbasis pustaka (*library research*) dan bersifat non-interaktif dengan cara mengumpulkan data, mengkaji dan menganalisa berbagai dokumen, baik berupa buku, jurnal, kitab dan berbagai sumber lainnya.<sup>14</sup> Selanjutnya, data-data tersebut akan dihubungkan dengan problem sosial sekarang, termasuk sisi lain dari berbagai aksi demonstrasi dengan menggunakan pisau analisa hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman.

Gerakan pertama dalam teori Fazlur Rahman akan bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era pewahyuan Al-Qur'an untuk mengkaji situasi atau problem historis di mana respon Al-Qur'an tersebut hadir sebagai jawaban, kemudian kembali dengan gerakan kedua dari masa pewahyuan ke masa sekarang untuk menemukan konteks sosio-historis yang kongkret di masa sekarang.<sup>15</sup>

### **REKAM JEJAK POLITIK HAMKA**

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dalam akronimnya dikenal sebagai Hamka lahir di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 M. atau 14 Muharram 1326 H.,<sup>16</sup> Ia merupakan salah

---

<sup>14</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 43-44.

<sup>15</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Movement," *Jurnah Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 1 (2013): 7-8.

<sup>16</sup> Mayoritas buku-buku biografi Hamka menyatakan bahwa ia dilahirkan pada tanggal 17 Februari, tetapi ada juga yang mencatat bahwa

satu putra dari Syekh Abdul Karim Amrullah yang ketika mudanya dikenal dengan sebutan Haji Rasul dengan istri pertamanya, Siti Safiyah.<sup>17</sup>

Hamka merupakan tokoh yang multitalenta, namun dari berbagai gelar yang melekat pada dirinya,<sup>18</sup> ia mengakui bahwa ia bukanlah seorang politikus ulung, tetapi lebih sebagai seorang wartawan dan sastrawan.<sup>19</sup> Dari tangannya lahir karya-karya besar nan fenomenal yang banyak terinspirasi dari pengalaman pribadinya, seperti *Si Sabariyah*, roman yang ditulis dalam dialek Minang,<sup>20</sup> *Di Bawah*

---

ia dilahirkan pada tanggal 16 Februari. Badiatul Roziqin, Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 188. Menurut penuturan Emzita, murid sekaligus anak angkat Hamka, sebenarnya hari lahir Hamka adalah 16 Februari. Hal itu dapat dilihat dari beberapa tulisan Hamka, bahkan dalam Risalah Islamiah, hari ulang tahunnya tertanggal 16 Februari. Lihat Emzita, "Seorang Ulama dan Pujangga Islam", ed. Yayasan Nurul Islam dalam *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Slipi Baru, 1978), 91.

<sup>17</sup> Lihat "Nama Saya Hamka", ed. Vincent Djauhari dalam *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), 51.

<sup>18</sup> Mochtar Naim, seorang antropolog dari Sumatera mengatakan, bahwa Hamka merupakan pribadi yang multitalenta, ia adalah segala-galanya, baik Ulama, pujangga, penyair, wartawan, budayawan, orator, penulis, kolumnis, politikus, pembaharu, pendidik, mahaguru hingga filosof. Abd. Haris, *Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2010), 7.

<sup>19</sup> Lihat Mohammad Roem, "Politik Hamka" dalam *Kenang-Kenangan 70 Tahun*, 10. Perjalanan karir Hamka secara kronologis dapat dibagi ke dalam tiga periode, yaitu periode Agam, periode Medan dan periode Jakarta. Ferry Taufiq El-Jaquene, *Buya Hamka: Kisah dan Catatan dari Balik Penjara*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 131-144.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 56.

Abd. Mun'em *PRINSIP-PRINSIP OPOSISI DALAM AL-QUR'AN "Studi Analisis Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar"*

*Lindungan Ka'bah* yang berkisah tentang fenomena kelas sosial di kalangan masyarakat Minang, *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, *Di dalam Lembah Kehidupan* dan *Merantau ke Deli* yang terbit secara berkala dalam *Pedoman Masyarakat*.<sup>21</sup> Selain itu, lahir pula *magnum opus* keagamaan berupa Tafsir Al-Azhar yang banyak digandrungin oleh para peneliti termasuk menjadi objek kajian dalam tulisan ini.

Kiprahnya dalam dunia politik tidak semulus predikatnya sebagai tokoh agama dan sastrawan. Perannya dalam politik praktis tidak begitu menonjol dan istimewa, sebagaimana pengakuan dalam sajak yang ia sampaikan dalam Simposium Budaya Ilam di Jakarta.<sup>22</sup> Salah satu perjuangan politik Masyumi adalah berusaha untuk menjadikan nilai-nilai Islam menjadi formal atau menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi selalu dihalangi oleh para penguasa.<sup>23</sup> Meski begitu, semangat perjuangannya dalam menegakkan hukum Islam tidak pernah padam dan bertekad untuk melawan segala bentuk kezaliman.<sup>24</sup>

Sebelum terjun ke dunia politik mewakili partai Masyumi, Hamka telah menjabat sebagai pegawai tinggi

---

<sup>21</sup> Baca Nasution, *Hamka Sebagai Pengarang*, 27.

<sup>22</sup> Baca A. Syaikh, "Hamka: Ulama, Pujangga, Politisi" dalam *Hamka di Mata Hati Umat*, 227.

<sup>23</sup> Ibid. Cara-cara yang ditempuhnya dalam mengekspresikan politik menjadikan ia sebagai tokoh kontroversial di Indonesia. Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

<sup>24</sup> Ibid.

Kementerian Agama.<sup>25</sup> Ia dan kawan-kawannya seringkali terlibat konfrontasi dengan Soekarno. Karena itulah, akhirnya Soekarno melarang pegawai pemerintah untuk aktif di dunia politik dan fokus melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara.

Hamka merupakan salah satu oposisi utama bagi pemerintahan Soekarno yang kiprahnya pernah dibungkam dengan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi Hamka menanggapi dengan tenang dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya, terutama dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Meski posisinya sebagai pembesar Muhammadiyah dan partai Masyumi, ia enggan memeralat umat Islam untuk melawan pemerintah dengan fisik dan mengangkat senjata. Sebaliknya, ia memilih untuk berpolitik secara elegan dan prosedural (elektoral) untuk menghindari terjadinya aksi anarkis yang bisa memakan korban.<sup>26</sup> Terlepas dari pro dan kontra politik Hamka, gagasan ini dipandang sangat bijak daripada memosisikan diri sebagai pihak yang anti pemerintah sebagaimana kelompok Islamis yang melakukan berbagai aksi teror,

---

<sup>25</sup> Baca Bahrum Jamil, *Hamka dalam Kenangan*, 41.

<sup>26</sup> Hal ini tentu berbeda dengan kelompok Islamis yang menganggap bahwa partai politik maupun politik elektoral itu haram, bobrok dan penuh tipu daya, sehingga mereka melarang pengikutnya untuk aktif di partai politik, baik sebagai pengurus maupun juru bicara. Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 246-248.

Abd. Mun'em *PRINSIP-PRINSIP OPOSISI DALAM AL-QUR'AN "Studi Analisis Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar"*

pemberontakan, makar dan berbagai tindakan ekstrem lainnya.<sup>27</sup>

Gagasan-gagasan politik Hamka yang elegan tersebut terefleksikan ke dalam penafsiran beberapa ayat Al-Qur'an yang memuat tema tentang anjuran untuk menjadi pribadi yang kritis, tidak mencela dan mencemooh pemimpin, larangan memusuhi penguasa dan bertindak makar, merawat persatuan dan kesatuan umat, serta terbuka untuk saling bahu-membahu dalam membangun negara. Namun meski berpolitik secara elegan, ia tetap tegas dan keras dalam mengkritik pemerintah, terlebih ketika usianya telah menua, karena ia menganggap masyarakat sebagai anak-anaknya yang sangat butuh terhadap bimbingan.<sup>28</sup>

## **PRINSIP-PRINSIP OPOSISI DALAM TAFSIR AL-AZHAR**

### **A. Menjadikan Predikat Oposisi sebagai Ladang dalam Berdakwah**

Oposisi seringkali dicap sebagai pembangkang dan biang keladi kegaduhan dalam sebuah negara, tetapi di sisi

---

<sup>27</sup> Kelompok Islamis yang sering melakukan tindakan brutal dan ekstrem di Indonesia di antaranya: Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka meyakini bahwa demokrasi dan sistem politik di Indonesia adalah sistem yang tidak Islami dan dilarang oleh agama. Oleh karena itu, mereka tidak terlibat aktif dalam pemilu di Indonesia, bahkan menganjurkan golput karena tidak sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. *Ibid.*, 248-249.

<sup>28</sup> Baca Zainnoel Abidin Soe'aib, "Hamka dan Saya" dalam *Kenang-Kenangan 70 Tahun*, 86.

lain kelompok inilah yang mampu menjaga keseimbangan politik dan mengawal kebijakan pemerintah. Predikat sebagai oposisi tidak serta-merta membuat sekelompok orang menjadi hina, justru iktikad yang baik dapat menyulapnya menjadi ladang dakwah dan sumber kebaikan. Hal ini telah dijelaskan oleh Hamka dalam surat Ali Imran 104:

وَأَتَىٰكَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.”<sup>29</sup>

Definisi dakwah menurut Hamka adalah menyeru pada kebaikan (*al-amru bil ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*an-nahyu 'anil munkar*). Objek dakwah terbagi menjadi dua, yaitu khusus dan umum. Dakwah umum merupakan dakwah kepada orang non-Muslim dalam rangka mengajak mereka menuju jalan kebenaran atau menangkis tuduhan-tuduhan negatif dan provokatif yang ditujukan kepada Islam. Sedangkan dakwah khusus adalah memberi peringatan kepada sesama Muslim agar berpegang teguh pada ajaran agama dan dengan kesadaran diri kembali ke jalan petunjuk apabila menyalahinya.<sup>30</sup> Hamka menekankan pentingnya sekelompok orang yang berani

<sup>29</sup> QS. Ali Imran (3): 104.

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), 866.

bersuara dan mengajak pada kebaikan dalam komunitas Muslim yang besar.<sup>31</sup> Maka jelas pihak oposisi termasuk ke dalam penjabaran ini, karena merekalah yang paling mampu bersuara dengan lantang menolak kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah, karena kezaliman yang dibiarkan begitu saja atau hanya diinkari dengan hati belaka menunjukkan lemahnya keimanan seseorang. Oleh karena itu, oposisi yang baik adalah yang mampu membangun persaingan yang sehat dan menyebarkan opini yang baik kepada publik, meskipun harus menghadapi kenyataan yang pahit. Hal itu ditegaskan oleh Nabi dalam sabdanya:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

“Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan keadilan di hadapan penguasa yang zalim.”<sup>32</sup>

Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan tidak boleh padam, meskipun harus berhadapan dengan penguasa yang zalim dan aniaya. Karena kezaliman yang dibiarkan tumbuh subur akan menjadi malapetaka yang besar di kemudian hari dan sulit untuk ditumpas. Jika hanya kekerasan yang mampu menghapus kezaliman, maka hal itu harus dilakukan. Tetapi jika tidak mampu bertindak karena kekuasaan yang lemah namun perkataan dan sikapnya masih didengar dan memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 867.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 869.

maka bersuara lantang juga merupakan kewajiban.<sup>33</sup> Hal inilah yang menjadi dasar betapa pentingnya peran oposan dalam suatu pemerintahan.

Orang yang berdakwah, termasuk juga oposan harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang strategi dakwah dan opini yang akan dibangun. Mereka harus menguasai etnologi atau ilmu tentang kondisi sosial dan psikologis orang yang akan diberi nasehat atau masyarakat yang akan diajak untuk berjuang bersama menuntut hak-hak dan keadilan. Maka pihak oposisi harus paham betul karakter orang Jawa, Sunda, Banjar atau Minang agar dengan mudah dapat mengumpulkan massa dan mencuri simpati dari mereka. Selain itu, pihak oposan harus menguasai betul ilmu politik dan arah kebijakan pemerintah, karena apabila kritik yang dilontarkan tidak cermat, maka akan menjadi blunder dan boomerang yang justru akan melemahkan posisinya sendiri di depan publik.<sup>34</sup>

Apabila bekal ini telah dikuasai dengan baik, maka akan mendorong oposan dalam melontarkan kritik konstruktif-reformatif yang dapat mematahkan argumen para pelaku kezaliman, karena bagaimanapun para pemimpin negara telah dipercayakan mandat oleh rakyat yang seharusnya dijalankan dengan baik. Maka menasehati

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 869-870.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 873-876.

mandataris yang nakal merupakan dakwah melalui jalur politik kenegaraan.<sup>35</sup>

## B. Memposisikan Oposisi sebagai Poros Pembangunan

Hamka menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada umat Islam disebabkan karena tidak adanya orang yang teguh pendirian dan berani menyuarakan kebenaran. Maka selagi ada yang pihak yang berani mencegah kemungkaran, mereka akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, sebagaimana dalam surat Hud 116:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ.

“Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang (berbuat) kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan.”<sup>36</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berani menyeru pada kebaikan dan melarang kemungkaran dapat memperbaiki generasi setelahnya, oleh karena itu ia memiliki jasa dan peninggalan yang akan terus dikenang oleh

---

<sup>35</sup> Muhammad Syarif Hasyim, “Oposisi Perspektif Al-Qur’an,” 296.

<sup>36</sup> QS. Hud (11): 116.

generasinya (*ulu baqiyatin*).<sup>37</sup> Silang pendapat dalam negara demokrasi merupakan anugerah, karena tuhan memang menciptakan mereka dalam pluralitas dan perbedaan. Dengan mengutip pendapat al-Qasyani, Hamka menyatakan bahwa suatu kaum akan menjadi maju karena adanya perbedaan. Jika mereka dituntut untuk memiliki kesamaan dalam pandangan, maka tidak ada bedanya dengan lebah dan semut yang tunduk pada kekuasaan ratunya. Apabila hal ini terjadi pada manusia, maka otoritarianisme dan kediktatoran akan merajelela di mana-mana.<sup>38</sup>

Kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat sebagai cita-cita luhur demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya pengawasan dan kontrol yang efektif dari oposisi, justru yang ada hanyalah relasi kartel politik antara elitisme dan oligarki. Oleh karena itu, eksistensi pihak oposan perlu diteguhkan untuk mengimbangi pelaksanaan kekuasaan (*power exercise*) dalam suatu pemerintahan.<sup>39</sup> Oposisi sendiri merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan yang diperoleh oleh rakyat melalui demokrasi, sehingga rakyat dapat terlibat aktif dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>40</sup> Pengaruh oposisi yang kuat menjadi bukti bahwa demokrasi telah mengakar kuat dalam sebuah negara.

---

<sup>37</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz 12, 3569.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 3572.

<sup>39</sup> Firman Noor, "Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 1-2.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 4.

### C. Menjadikan Tegaknya Keadilan sebagai Cita-Cita Perjuangan

Memilih bergabung ke dalam lingkaran pemerintah atau menjaga jarak sebagai oposan hanyalah perbedaan dalam memilih jalur politik, karena cita-cita yang mereka perjuangkan pada hakikatnya sama, yaitu mewujudkan keadilan dan kedaulatan rakyat. Menjadi oposan demi tegaknya keadilan di dalam sebuah negara merupakan suatu kewajiban. Sebaliknya, jika hanya mengejar pangkat, jabatan dan kekayaan maka sangat dilarang oleh agama.<sup>41</sup> Oposan yang baik tentu akan memilih jalur yang pertama, yaitu memperjuangkan keadilan bagi sesama, terutama bagi rakyat jelata yang telah dirampas hak-haknya, sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”<sup>42</sup>

Ayat ini berisi perintah untuk berdiri membela kebenaran dan keadilan. Jika suatu daerah atau negara dipimpin oleh pemimpin yang zalim, maka rakyat dan oposan

---

<sup>41</sup> Neveen Abdul Malik Musthafa, *Oposisi Islam*, 105-106.

<sup>42</sup> QS. An-Nisa' (4): 135.

harus berani melawan atas nama keadilan. Bersuara tentang keadilan haruslah dilandasi kesadaran diri bahwa perjuangan yang dilakukan semata-mata karena perintah Allah, oleh karena itu mereka tidak akan pernah takut pada ancaman dan intervensi dari siapapun. Berani berjuang atas nama keadilan tidak hanya berlaku kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri, bahkan termasuk yang paling sulit untuk dilakukan oleh seseorang adalah bersikap adil terhadap diri sendiri, karena seseorang cenderung memaklumi kesalahan pribadi tapi berkeras hati melihat kesalahan orang lain.<sup>43</sup> Maka sebagai oposisi yang baik, haruslah tampil sebagai kesatria yang tidak gengsi mengakui dan mengapresiasi kinerja pemerintah apabila programnya berjalan dengan baik, di saat yang bersamaan berani mengakui kelemahan dan kekurangannya di hadapan orang lain.

Dalam konteks politik Indonesia, setidaknya ada tiga peran yang dapat dimainkan oleh pihak oposan. *Pertama*, sebagai menyeimbang kekuatan pemerintah, oleh karena itu harus ada pembagian kekuasaan (*division of power*) untuk mencegah hegemoni para elit yang tiranik atau despotik. *Kedua*, memberikan alternatif pikiran dan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar pro-rakyat. *Ketiga*, merangsang persaingan yang sehat antara pemerintah dengan partai-partai oposan. Pengaruh oposisi yang kuat akan menyadarkan pemerintah jika ada kekuatan yang bisa mengusik posisi mereka, sehingga mau tidak mau

---

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz 5, 1466-1467.

harus meningkatkan kinerja dan menjaga nama baik mereka di mata publik.<sup>44</sup>

#### D. Menasehati dengan Kritik yang Elegan

Berdakwah dan menesehati orang lain haruslah berangkat dari kesucian hati, kemurnian jiwa dan demi kepentingan bersama, bukan hanya memenuhi ambisi pribadi dan memuaskan nafsu belaka.<sup>45</sup> Maka dalam hal ini, pihak oposan haruslah melontarkan kritik yang jelas dan tegas namun dengan cara-cara yang elegan dan tidak menyinggung perasaan, tidak mencaci, mencemooh dan memanggil pemerintah dengan sebutan yang buruk, sehingga pesannya mudah diterima oleh semua orang.<sup>46</sup> Karena jika tidak demikian, mereka akan kehilangan simpati dari masyarakat dan membuat posisi penguasa semakin merajalela. Prinsip ini telah dijabarkan dalam surat Fushshilat 33:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

“Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang terlibat permusuhan denganmu akan seperti teman yang setia.”<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Firman Noor, “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi,” 6.

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* 24, 6468.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Juz 26, 6827-6828.

<sup>47</sup> QS. Fushshilat (41):33.

Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan orang yang berdakwah dan memberi nasehat menuju jalan yang benar adalah sangat tinggi dan luhur.<sup>48</sup> Maka dalam konteks bernegara, oposisi yang baik yang selalu melakukan pengawasan, kritik dan perbaikan merupakan posisi mulia yang diakui oleh Al-Qur'an, meskipun pendapatnya sering diabaikan bahkan dianggap sebagai benalu oleh pemangku jabatan. Hamka menjelaskan, bahwa orang yang hendak menasehati orang lain haruslah dibekali dengan tekad yang bulat, teguh pendirian dan konsisten, karena dengan begitulah usahanya akan berhasil.<sup>49</sup> Selain itu, dia harus terlebih dahulu mengerjakan apa yang dia katakan kepada orang lain, karena mustahil orang lain akan menerima masukannya jika dia sendiri tidak melakukan.

Dakwah dan seruan terhadap kebaikan pasti menemui halangan dan rintangan. Namun apapun yang terjadi, jangan sampai kejelekan dari lawan disikapi dengan cara-cara yang tidak bijak. Jangan karena berada di posisi yang benar kemudian bersikap seenaknya, karena terkadang suatu kebaikan akan menjadi sirna karena tindakan yang ceroboh.<sup>50</sup> Budi pekerti yang baik akan mampu merubah persepsi orang lain. Maka ketika orang lain bersikap sebagai lawan, hendaknya disambut sebagai kawan. Ketika datang dengan amarah dan makian, maka hendaknya diredam dengan kasih

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, juz 24, 6467.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 6467-6468.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 6471.

sayang.<sup>51</sup> Strategi ini akan sangat efektif dalam berdakwah dan menyeru dalam kebaikan, karena menunjukkan ketulusan jiwa dan kematangan mental.

Bersikap kritis terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui benar dan salahnya, maupun manfaat dan bahayanya merupakan sesuatu yang sangat penting.<sup>52</sup> Maka sebagai rakyat yang baik, patut kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila keputusan tersebut baik, maka tak ada alasan untuk menentang bahkan sudah menjadi kewajiban untuk menyuksekannya, tetapi apabila membawa bahaya dan kerusakan, maka oposisi harus mampu merangkul rakyat untuk bersama-sama menolak kebijakan tersebut. Hal ini karena rakyat merupakan penguasa tertinggi di Indonesia, maka jangan sampai mereka hanya menjadi boneka mainan para penguasa. Peringatan ini telah Allah fiermankan dalam surat al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا.

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 6472.

<sup>52</sup> *Ibid.*, juz 15, 4058.

<sup>53</sup> QS. Al-Isra (17): 36.

## E. Menjadikan Musyawarah sebagai Pendekatan dalam Berdakwah

Berbagai pendekatan dapat ditempuh dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, seperti mengirim surat, bertemu langsung atau memanfaatkan media untuk bersuara. Apapun bentuk diskusi antara kedua belah pihak, mereka tidak boleh meninggalkan prinsip musyawarah, karena musyawarah merupakan media untuk menyatukan pluralitas pemikiran dalam bernegara. Allah telah menjelaskannya dalam surat Ali Imran 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”<sup>54</sup>

Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan bagi setiap urusan manusia, baik urusan dunia maupun agama. Urusan agama seperti ibadah dan syariat telah ditetapkan dalam keduanya, tetapi dalam urusan dunia, mereka bisa berikhtiar mencari jalan terbaik yang dapat membawa kemaslahatan bersama di kalangan masyarakat dengan tetap menjadikan spirit Al-Qur'an sebagai landasannya. Hal ini dicontohkan oleh Nabi ketika beliau menyerap aspirasi para sahabat tentang strategi terbaik dalam peperangan, sehingga pasukan Muslim memperoleh berbagai kemenangan di medan perang. Maka menurut Hamka,

---

<sup>54</sup> QS. Ali Imran (3): 159.

musyawarah menjadi kunci utama dalam suksesnya pembangunan masyarakat dan negara Islam.<sup>55</sup>

#### F. Berontak atas Nama Keadilan

Setelah melakukan mediasi dengan baik dan santun melalui musyawarah, pihak oposan dapat mengambil langkah lanjutan. Apabila setelah ditegur pemerintah akhirnya bisa berubah, maka tak ada alasan lagi untuk menyalahi kebijakannya, tetapi jika mereka tetap dalam kezaliman yang mereka lakukan, maka oposan bersama rakyat harus menempuh cara yang lebih tegas dan keras.

Rakyat harus menentang segala bentuk tindakan dan kebijakan yang zalim dari pemerintah, walaupun harus memposisikan diri mereka sebagai pemberontak, sebagaimana dilakukan oleh Husain bin Ali terhadap pemerintahan Yazid yang berakhir dengan pembantaian di Karbala.<sup>56</sup> Hamka mengutip pendapat para Ulama tentang keharusan merampas kekuasaan dari tangan pemimpin Islam yang murtad, atau meskipun tidak murtad tetapi tindakannya telah melenceng dari ajaran agama, seperti menampakkan kezaliman dan menghalalkan yang haram semisal babi, zina dan pembunuhan. Pemimpin yang demikian boleh ditentang dan dilengserkan. Tetapi merebut kekuasaan dari tangan pemimpin yang benar, baik dan beriman hanya untuk menduduki jabatannya, maka sama sekali hal itu tidak

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Juz 4, 968.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Juz 6, 1721.

dibenarkan, kecuali apabila dia telah terang-terangan melakukan perbuatan kufur dan menyimpang dari ajaran agama.<sup>57</sup>

Pemimpin yang melakukan kezaliman, baik presiden, menteri hingga pemerintah tingkat desa tidak boleh langsung dilengserkan, tetapi ia harus dinasehati terlebih dahulu agar kembali pada jalan kebenaran. Tetapi apabila dia berkeras diri dalam jalan kesesatan, maka dengan cara apapun dia harus diganti dengan yang lebih baik. Sejarah Islam mencatat jika para pemuka agama Islam tidak mudah melakukan makar dan pemberontakan. Mereka dengan sabar membimbing pemimpin yang zalim agar mau bertaubat, karena tindakan makar yang terlalu dini akan mengakibatkan kerusakan yang fatal dengan fitnah yang besar pula sebagaimana sejarah Ali dan Muawiyah.<sup>58</sup>

#### G. Mengantisipasi Munculnya Kezaliman sejak Dini

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pemimpin yang zalim adalah karena rakyat sendiri yang ceroboh dengan menukar suara mereka dengan uang pada saat pemilihan umum, sehingga muncul pemimpin yang tidak kompeten dan pada akhirnya membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Agar hal tersebut tidak terulang kembali, sudah menjadi tugas bagi pihak oposan untuk mengedukasi masyarakat tentang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 1721.

<sup>58</sup> *Ibid.*

pentingnya menyerahkan amanah kepada yang ahli dan kompeten di bidangnya, sebagaimana Allah terangkan dalam surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”<sup>59</sup>

Ayat ini berkisah tentang masuknya Nabi ke Ka'bah dalam peristiwa penaklukan Makkah. Beliau meminta kunci ka'bah dari juru kuncinya, yaitu Usman bin Thalhaf, di mana posisi juru kunci Ka'bah merupakan posisi yang mulia pada saat itu. Setelah selesai melaksanakan thawaf, sahabat Ali dan Ibnu Abbas memohon agar kunci itu diserahkan kepada mereka, namun dengan tegas Nabi menolak. Lantas beliau memanggil Usman bin Thalhaf dan menyerahkan kunci itu kepadanya, karena dialah yang memang berhak dan mendapat amanah sebelumnya untuk menjadi juru kunci Ka'bah.<sup>60</sup>

Hamka menilai bahwa perintah untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya merupakan perkara serius dan menjadi substansi dari ayat ini. Nabi telah mencontohkan, betapa beliau mengesampingkan kelas sosial dan kekerabatan hanya untuk menyerahkan suatu urusan kepada orang yang benar-benar ahli di bidangnya.<sup>61</sup> Maka dalam konteks negara

---

<sup>59</sup> QS. an-Nisa (4): 58.

<sup>60</sup> *Ibid.*, juz 5, 1265-1266.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 1268-1269.

demokrasi seperti Indonesia, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib berhati-hati dalam menyerahkan amanah kepada wakilnya, yaitu kepada pemimpin yang berintegritas, ulet dan bertanggung jawab. Karena jika tidak demikian, rakyat sendiri yang akan menjadi korban. Hamka juga mengutip Hadis Nabi tentang larangan memberikan kekuasaan kepada orang yang sengaja meminta suatu jabatan dan pekerjaan, karena hal itu dilandasi oleh rasa tamak terhadap kekuasaan. Bahkan jika ada orang yang meminta suatu jabatan, hendaknya dihindari dan dijadikan alasan untuk tidak memilihnya. Jabatan yang dia peroleh pada hakikatnya merupakan sebuah penghianatan, karena bukan dilandasi skill yang mumpuni dalam kepemimpinan.<sup>62</sup>

#### H. Tidak Menjadikan Fitnah dan Hoaks sebagai Senjata dalam Mengkritik Pemerintah

Dalam uraian di atas, telah dijabarkan tata cara elegan dalam menasehati pemerintah, oleh karena itu seyogyanya pihak oposan tidak bisa menggunakan trik-trik kotor dan ilegal. Cara keji yang ditentang oleh agama meskipun untuk membasmi kezaliman adalah fitnah dan hoaks. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً<sup>ص</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 1271-1272.

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu.”<sup>63</sup>

Ayat ini bercerita tentang kunci kemenangan kaum Muslimin dalam perang Badar, yaitu adanya ketaatan kepada titah pemimpin, kuatnya rasa persatuan dan tingginya kedisiplinan. Keberhasilan yang dicapai perorangan maupun kolektif seperti ini bisa saja dihancurkan oleh fitnah atau isu-isu yang sengaja disebar oleh oknum tertentu, sehingga akan terjadi sikap saling curiga, saling cemburu dan menyalahkan hingga terjadi perseteruan dan pertengkaran yang pada akhirnya kehancuran akan datang dengan sendirinya dari dalam. Dampaknya akan sangat mengerikan, karena fitnah akan menghilangkan akal sehat, sehingga terjadi kekaburan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa pelaku dan siapa korbannya.<sup>64</sup>

Hamka meyakini jika persatuan dan kesatuan hanya akan terjadi jika dilandasi oleh kuatnya keyakinan kepada tuhan, maka persatuan yang hanya dilandasi oleh fanatik klan atau golongan tertentu akan dengan mudah dihancurkan oleh lawan.<sup>65</sup> Sejarah Islam mencatat, hancurnya kekuasaan Khalifah Usman terjadi karena adanya fitnah yang sengaja disebar oleh lawan politiknya. Fitnah tersebut terus menyebar hingga terjadi pertikaian satu keluarga antara Ali dan Aisyah.

---

<sup>63</sup> QS. al-Anfal (8): 25.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 2724-2725.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 2725.

Kehancuran umat Islam diperparah dengan meletusnya perang *Shiffin* antara Ali dan Muawiyah hingga menjadi tonggak sejarah perpecahan dalam sejarah umat Islam yang terus membekas sampai sekarang.<sup>66</sup>

Fitnah pada masa Usman yang tidak terselesaikan pada akhirnya terus memakan korban, begitu juga dalam kehidupan saat ini. Maka fitnah, intimidasi dan provokasi dengan berbagai bentuknya bukanlah cara yang baik dalam mengawasi pemerintah atau mengambil kekuasaan darinya, justru menyalahi cita-cita politik dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, fitnah dan hoaks yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan mengancam keutuhan negara harus diredam dan diselesaikan agar tidak menimbulkan kehancuran yang lebih besar di kemudian hari.

## **KESIMPULAN**

Hamka merupakan salah satu pemimpin partai dengan pengikut terbesar pada masanya. Ia pernah berada dalam lingkaran pemerintah juga pernah menjaga jarak sebagai oposisi. Meski sering terlibat konfrontasi dengan pemerintah, ia tidak memanfaatkan kekuatan massa untuk berbuat anarkis dan melawan penguasa, bahkan ia menempuh cara-cara elegan dengan berjuang secara elektoral sebagai oposisi. Dalam peta politik Indonesia, setidaknya oposisi memiliki tiga tugas utama dalam bernegara, yaitu sebagai menyeimbang kekuatan pemerintah, memberikan alternatif gagasan dan kebijakan dalam bernegara serta merangsang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 2726.

persaingan dengan pemerintah dan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerjanya.

Beberapa prinsip dalam beroposisi yang dikemukakan oleh Hamka dalam tafsirnya antara lain: menjadikan predikat oposisi sebagai ladang dalam berdakwah, memosisikannya sebagai poros pembangunan dan bukan alat untuk unjuk kekuatan, menjadikan tegaknya keadilan dan kedaulatan rakyat sebagai cita-cita utama semangat perjuangan, lemah lembut dan menempuh cara-cara elegan dalam menasehati pemerintah, mengedepankan musyawarah sebagai media utama dalam berdakwah dan mengkritik pemerintah, berani memberontak dan bertindak makar apabila cara-cara halus yang ditempuh tidak berhasil menyadarkan penguasa dalam menegakkan keadilan, mengantisipasi munculnya kezaliman sejak dini dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya selektif dalam Pemilu serta tidak menggunakan fitnah dan hoaks sebagai alat untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah yang sah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Asrowi. "Prinsip-Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*. 2019.

- Djauhari, Vincent. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan. 1996.
- Islam, Yayasan Nurul. *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*. Jakarta: Slipi Baru. 1978.
- El-Jaquene, Ferry Taufiq. *Buya Hamka: Kisah dan Catatan dari Balik Penjara*. Yogyakarta: Araska. 2018.
- Hakim, Ahmad dan M. Thalhah. *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Haris, Abd. *Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. 2010.
- Hasyim, Muhammad Syarif. "Oposisi Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Rausyan Fikr*. 2016.
- Hilmy, Masdar. *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- J., Hasse. "Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *Jurnal Studi Pemerintahan*. 2012.
- KBBI*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Kurniawan, Toni. "Larangan Demo oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta." *Jurnal Politica*. 2021.

Abd. Mun'em *PRINSIP-PRINSIP OPOSISI DALAM AL-QUR'AN "Studi Analisis Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar"*

Musthafa, Neveen Abdul Khalik. *Oposisi Islam*. terj. Ali Ghufron. Yogyakarta: LKiS. 2012.

Noor, Firman. "Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 2016.

Putri, Dian dan Eficandra. "Demonstrasi dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. 2021.

Rifki, Sumantri. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Ahda Movement." *Jurnah Dakwah dan Komunikasi*. 2013.

Roziqin, Badiatul, Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara. 2009.

Sacipto, Rian. "Kajian Praktik *Money Politics* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Adil Indonesia*. 2019.

Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 2020.